

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Umum

Pelaksanaan penguatan *civic governance* melalui partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung belum dapat dilaksanakan secara optimal sehubungan masih terdapatnya berbagai masalah yang berkaitan dengan belum konsistennya pemerintah Kabupaten Bandung dalam memberikan akses secara terbuka kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta masih rendahnya tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat secara perorangan maupun kelompok/organisasi untuk memposisikan sebagai mitra kerja pemerintah dalam mengkritisi dan memberikan saran terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah daerah.

2. Khusus

Dari temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kebijakan otonomi daerah yang bertujuan untuk membentuk dan menguatkan *civic governance* melalui partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan diawali dengan penyusunan *platform* otonomi daerah yang bersifat normatif serta dijadikan pedoman atau panduan penyelenggaraan sistem pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Platform yang

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

menjiwai visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung ini selain disosialisasikan secara optimal kepada aparatur pemerintah juga turut disosialisasikan kepada masyarakat guna adanya kesinambungan dan sinergitas antara program pemerintah dengan aspirasi masyarakat yang menuntut keterbukaan serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas wilayah. Dalam tahap implementasi, platform otonomi daerah menunjukkan bahwa secara bertahap dan berkesinambungan telah terbangun pemerintahan yang bercirikan *civic governance*. Namun pelaksanaan *civic governance* belum optimal sehubungan sebagian besar masyarakat Kabupaten Bandung sangat kurang berpartisipasi dalam mendukung berbagai program pemerintah yang bernuansa memperkokoh integrasi nasional maupun memperkuat stabilitas wilayah.

- b. Aktualisasi peran serta masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung lebih didominasi melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pola dan mekanismenya telah ditentukan berdasarkan aturan-aturan atau landasan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung kurang optimal dalam memunculkan inisiatif dan kreativitas kegiatannya yang bernuansa penguatan *civic governance*. Dampak dari fenomena tersebut adalah masih tingginya tingkat mobilisasi massa oleh pemerintah dalam penguatan kegiatan *civic governance*. Kenyataan ini kurang sesuai dengan maksud dan tujuan dari penyelenggaraan konsep *civic*

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

governance itu sendiri yang sangat mengutamakan tingkat partisipasi masyarakat yang tidak dimobilisasi atau diintervensi oleh kekuasaan pemerintah.

- c. Peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa di Kabupaten Bandung guna memperkokoh integrasi nasional memiliki peranan yang sangat strategis karena nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan banyak digunakan (diadopsi atau disisipkan) melalui berbagai program kegiatan pembangunan karakter bangsa yang dominan diselenggarakan oleh Kantor Kesbangpol Linmas. Sedangkan simbol-simbol yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mentransformasikan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan tersebut dilakukan melalui simbol visual (gambar), verbal (ucapan) dan ritual (budaya/adat dan agama). Simbol-simbol yang digunakannya telah terbukti sangat mengoptimalkan proses transformasi nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan dalam pembangunan karakter bangsa ketimbang melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat doktrin (misalnya penataran dan simposium) yang sulit menggali potensi sikap kritis dari masyarakat.
- d. Model *civic governance* di Kabupaten Bandung pada dasarnya dilandasi oleh tiga unsur utama yang meliputi *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic dispositions* yang selanjutnya ketiga unsur utama tersebut melakukan proses adaptasi terhadap aspek-aspek pendidikan kewarganegaraan, pembangunan karakter bangsa, partisipasi masyarakat, otonomi daerah dan integrasi nasional. Hasil akhir dari proses adaptasi terhadap aspek-aspek tersebut di atas berupaya mewujudkan

kondisi sebagai berikut :

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- 1) Terciptanya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif.
- 2) Optimalisasi nilai-nilai pembangunan karakter bangsa yang teraktualisasikan dalam pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi masyarakat.
- 3) Terciptanya warganegara yang cerdas, kritis, partisipatif, demokratis, taat hukum, beradab dan religius.

B. Saran-saran

1. Umum

Topik penelitian mengenai penguatan *civic governance*, merupakan studi eksplorasi terhadap aktualisasi peranserta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung yang memiliki dimensi mikro. Penelitian ini telah berusaha mengkaji upaya transformasi nilai-nilai pembangunan karakter bangsa dan penguatan *civic governance* serta aktualisasi peranserta masyarakat dalam proses pemerintahan, namun di karenakan unit kajiannya hanya terfokus di lingkungan pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Bandung, maka penelitian ini berdimensi lokal. Hal ini tentu merupakan keterbatasan dari penelitian ini. Untuk itu peneliti mengajukan beberapa saran untuk beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Penelitian ini terbatas kepada pandangan elit pemerintahan dan tokoh masyarakat yang secara langsung maupun tak langsung kurang menggali pendapat aparat pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung secara keseluruhan. Untuk itu perlu dilakukan kajian penelitian lebih lanjut yang sampelnya diperbesar agar

kajian tentang penguatan *civic governance* dalam kerangka otonomi daerah

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

sebagai landasan memperkuat integrasi nasional ini semakin lebih objektif dan ditemukan model *civic governance* yang lebih baik.

- b. Keberhasilan penguatan *civic governance* dalam kerangka otonomi daerah sebagai landasan memperkuat integrasi nasional memerlukan prasyarat sistemik yang dapat menunjang dan mendukung kesuksesan transformasi nilai-nilai pembangunan karakter bangsa terhadap aktualisasi peranserta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari suprastruktur hingga infrastruktur yang ada di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat Kabupaten Bandung. Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti menyarankan agar gagasan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan sehingga mewujudkan *civic governance* yang ideal untuk diseminasikan secara populis dan kontekstual kepada komponen aparatur pemerintahan di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Bandung sampai ke tingkat pemerintah Nasional.
- c. Kesuksesan penguatan *civic governance* serta aktualisasi partisipasi masyarakat yang optimal melalui transformasi nilai-nilai pembangunan karakter bangsa, menunjukkan sangat tergantung kepada kebijakan politik pemerintah setempat. Jadi muaranya ada pada kehandalan pimpinan daerah dan para stafnya. Bisa dibayangkan apabila dimasa pragmatisme dalam kancah globalisasi yang penuh dengan sikap individualistis saat ini penuh dengan pimpinan dan aparat pemerintah yang tidak mau peduli terhadap nilai-nilai nasionalisme maupun kepentingan masyarakat. Dengan demikian di masa depan perlu dipikirkan

langkah konkrit penguatan *civic governance* dalam kerangka otonomi daerah

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

melalui transformasi nilai-nilai pembangunan karakter bangsa yang jauh lebih inovatif, sistematis dan berkelanjutan tanpa tergantung kepada kebijakan politik sang penguasa daerah.

2. Khusus

- a. Kebijakan otonomi daerah tentang penguatan *civic governance* seharusnya dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat kebijakan yang bersifat normatif dan sentralistis hanya akan menjadikan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak optimal atau terhambat implementasinya. Sudah seharusnya pemerintah daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat tentang pentingnya konsep *civic governance* serta meminimalisir tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi ini akan berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh kebijakan yang membuka peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Aktualisasi peran serta masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung sudah seharusnya tidak lagi terfokus kepada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pola dan mekanismenya telah ditentukan berdasarkan aturan-aturan atau landasan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah daerah turut memfasilitasi dan mendukung penuh kegiatan

masyarakat yang melakukan pemberdayaan kepada masyarakat lainnya melalui

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

advokasi, pembinaan, pendampingan atau kegiatan lainnya sehingga partisipasi masyarakat tidak terjebak pada proses penyelenggaraan pemerintahan yang semu. Pada dasarnya, dalam penguatan *civic governance* melalui partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- 1) adanya inovasi dan pemikiran kreatif di kalangan masyarakat maupun aparat pemerintahan yang bertujuan untuk kepentingan bersama;
- 2) terdapat tingkat toleransi yang tinggi terhadap kritik yang datang dari masyarakat dengan mengembangkan sifat *positive thinking* di kalangan aparat pemerintah terhadap kritik itu sendiri;
- 3) adanya budaya di kalangan pengelola pemerintahan untuk berani mengakui atas kesalahan yang mereka buat dalam merencanakan pembangunan dan pemerintahan;
- 4) adanya sistem evaluasi program pembangunan dan pemerintahan yang mengarah pada terciptanya kemampuan rakyat untuk secara mandiri mencari permasalahan pada proses penyelenggaraan pemerintahan dan pemecahan terhadap permasalahan itu sendiri;
- 5) minimnya budaya paternalisme yang selama ini mewarnai interaksi antara pimpinan instansi pemerintah dengan masyarakat;
- 6) adanya pengakuan hak partisipasi untuk rakyat/warganegara dari penyelenggara pemerintahan yang pada akhirnya masyarakat diizinkan untuk

menciptakan pembangunan, bukan hanya mendukung pembangunan; dan

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- 7) optimalnya pembudayaan budaya demokrasi di kalangan aparat pemerintah.
- c. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa di Kabupaten Bandung perlu terus ditingkatkan peranannya sehubungan masih minimnya program-program kegiatan pemerintah yang mengadopsi atau berlandaskan nilai-nilai dari pendidikan kewarganegaraan sehingga keberadaan pendidikan kewarganegaraan terkesan formalitas belaka. Selain itu kegiatan yang bernuansa pembangunan karakter bangsa masih bersifat doktrin, formalitas dan kurang membuka dialog antara pemerintah yang diwakili oleh Bappeda dan Badan Kesbanglinmas dengan masyarakat. Apabila peran pendidikan kewarganegaraan tidak dioptimalkan maka pembangunan karakter bangsa di Kabupaten Bandung sangat sulit untuk melakukan penguatan *civic governance* maupun menunjang terwujudnya integrasi nasional yang kokoh.
- d. Model *civic governance* di Kabupaten Bandung perlu terus dikembangkan melalui kajian atau bentuk penelitian lainnya mengingat model yang dibangun dan dikembangkan dalam bentuk 22 (duapuluh dua) model penguatan *civic governance* oleh penulis masih terfokus kepada aktualisasi *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic dispositions*. Hal ini menandakan bahwa penemuan model ini oleh penulis masih memiliki kelemahan dalam aspek metode penelitian, teknik pengumpulan data serta sampel yang terlibat. Di masa yang akan datang model ini harus direvisi dan terus dikembangkan agar mampu menjadi pedoman bagi terselenggaranya penguatan *civic governance* dan pelaksanaan partisipasi

masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kabupaten Bandung.

-0-

